

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan proses penelitian yang berjudul “*Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998*”. Dalam membahas permasalahan yang berkenaan dengan judul yang telah disebutkan diperlukan informasi maupun data-data yang dapat tervalidasi dengan baik untuk menghasilkan sumber yang akurat sehingga memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian yang dimaksud.

Untuk dapat mengumpulkan dan mengatur informasi mana saja yang tepat maka dibutuhkan sebuah metode yang tepat untuk bisa menghimpun data yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Sartono Kartodidjo (dalam Samsuddin, 2020, hlm.10) metode adalah “bagaimana orang memperoleh pengetahuan” atau “*how to know*”, dan metodologi sebagai yaitu “mengetahui bagaimana harus mengetahui” atau “*to know how to know*”. Hal ini membuat peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian sejarah dikarenakan memiliki korelasi yang tepat dengan latar belakang peneliti sebagai mahasiswa sejarah, serta juga berkaitan erat dengan topik yang peneliti angkat yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi.

Prosedur yang dapat dilakukan dalam melakukan penelitian menggunakan metode sejarah memiliki beberapa perbedaan tata cara dari para ahli ilmu sejarah. dalam hal ini peneliti memilih menggunakan metode sejarah yang disampaikan oleh Helius Samsuddin untuk membantu dalam penelitian yang dilakukan. Namun peneliti menyadari bahwa dengan hanya mengandalkan ilmu sejarah tidak akan sepenuhnya membantu sehingga perlu ditunjang dengan ilmu bantu lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan. Dengan melakukan

pendekatan interdisipliner, peneliti menggunakan ilmu hukum sebagai ilmu bantu dalam melaksanakan penelitian. Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari kaidah, prinsip, dan lembaga hukum, serta hubungannya dengan masyarakat (Mertokusumo, 2007, hlm. 15). Mengingat penelitian yang diteliti berkaitan dengan lembaga negara yang berkaitan langsung dengan hukum yang berjalan pada masa Orde Baru, maka ilmu bantu ini dapat memberikan dampak terhadap pandangan hukum sebuah lembaga negara.

3.1. Metode Penelitian Sejarah

Dalam melakukan penelitian dengan judul “*Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998*” ini, menggunakan metode historis yang dirancang oleh Helius Sjamsuddin, yang dimana terdapat empat tahapan dalam metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam penjelasan Sjamsuddin (55-99), penjelasan dari keempat tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Heuristik atau pengumpulan sumber sejarah merupakan tahapan untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan data, fakta dan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Sumber-sumber sejarah itu bisa berupa dokumen, arsip, buku dan lain sebagainya.
2. Kritik sumber merupakan proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga dapat disajikan dalam bentuk cerita sejarah (Ismaun, 2005, hlm. 35). Dalam proses kritik tersebut terbagi lagi menjadi dua tahap yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah proses pengujian terhadap sumber sejarah dari aspek material seperti bahan dan bentuk sumber, umur dan bentuk sumber dan lain sebagainya (Ismaun, 2005, hlm. 50).
3. Interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap sumber-sumber yang sudah dilakukan proses kritik secara internal maupun eksternal. Dalam proses ini, seorang sejarawan harus mencurahkan daya pikirnya dalam proses penafsiran tersebut. Melakukan analisis- analisis secara kritis dan mendalam terhadap

sumber-sumber yang sudah didapatkan di lapangan. peneliti melakukan penafsiran terhadap beberapa sumber yang telah ditemukan. Disini peneliti melakukan beberapa komentar dan pandangan terhadap sumber-sumber yang didapatkan.

4. Historiografi atau penulisan ulang sejarah merupakan tahapan akhir dari proses penelitian sejarah. Dalam hal ini, proses penyusunan hasil penelitian akan disusun dalam suatu karya ilmiah yang bernama skripsi. Pada akhirnya skripsi ini akan menjadi suatu tulisan yang tersusun secara tersistematis yang telah melewati serangkaian metode ilmiah yang berkenaan tentang “Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Pemerintahan Presiden Soeharto Masa Orde Baru Tahun 1966-1998”

Selain keempat tahapan diatas, Wood Gray (dalam Sjamsuddin, 2020, hlm. 57) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah, yaitu:

1. Memilih suatu topik yang sesuai;
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik;
3. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung;
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan;
5. Menyusun hasil-hasil penelitian ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya;
6. Menyajikan dalam suatu yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca agar dapat dimengerti sejelas mungkin.

Poin satu, dua dan tiga termasuk ke dalam bagian heuristik atau pencarian sumber sejarah. Poin empat termasuk ke dalam bagian kritik sumber atau melakukan pengujian secara analitis terhadap sumber-sumber sejarah. Sedangkan poin lima dan enam masuk ke dalam proses interpretasi (penafsiran) terhadap sumber yang telah diuji kebenarannya dan tahap historiografi yaitu penulisan peristiwa sejarah dari seluruh rangkaian hasil penelitiannya.

3.2. Tahapan Penelitian

Pada tahapan penelitian akan dijelaskan bagaimana peneliti melalui proses penelitian skripsi yang disusun, dimulai dengan melakukan pemilihan topik yang akan diangkat dalam penelitian skripsi, dan setelah itu menyusun sebuah proposal penelitian skripsi yang dipresentasikan dalam mata kuliah Seminar Penelitian Karya Ilmiah (SPKI). Apabila rancangan proposal penelitian dianggap layak dilanjutkan, maka judul penelitian diajukan kepada Tim Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS).

Apabila judul sudah disetujui oleh tim, maka selanjutnya penelitian tersebut dapat dilanjutkan dalam sebuah Seminar Proposal. Setelah itu peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yang sudah ditetapkan, yang dimana dosen pembimbing akan menjelaskan bagaimana tahapan penelitian yang cocok dengan penelitian yang dilakukan.

3.2.1. Persiapan Penelitian

Pada tahap awalan dalam mempersiapkan sebuah penelitian, dibutuhkan cara yang tepat untuk memilih metode penelitian yang tepat, dapat dimulai dengan memilih sebuah topik yang diangkat untuk dijadikan sebuah penelitian, dilanjutkan dengan menyusun sebuah rancangan penelitian hingga akhirnya melaksanakan proses bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Hal ini pada akhirnya menghasilkan persiapan yang matang untuk bisa menyusun sebuah penelitian. Persiapan penelitian ini dimulai pada awal semester lima, tepatnya tanggal 1 September 2022 hingga 6 Maret 2024.

3.2.1.1. Penyusunan Rancangan Penelitian

Pada awalnya peneliti membawakan sebuah judul penelitian “*Perubahan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Pada Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1945-2003*” dengan pembahasan mengenai awal mula Dewan Pertimbangan Agung terbentuk pada awal kemerdekaan Indonesia. Lalu peneliti membahas bagaimana pada tahun 2003 Dewan Pertimbangan Agung dibubarkan, dan setelah itu membahas secara singkat bagaimana Dewan Pertimbangan Presiden akhirnya muncul menggantikan Dewan

Pertimbangan Agung pada tahun 2007. Judul ini pada mulanya diajukan kepada Dr. Murdiah Winarti, M.Hum. untuk diperiksa pada bulan Februari 2024. Namun dikarenakan kurangnya data serta rentang waktu yang terlalu panjang, membuat peneliti perlu mengkaji ulang rentang tahun yang akan dipilih. Pada akhirnya setelah berkonsultasi dengan Dosen Pengampu Akademik Bapak Prof. Agus Mulyana, M.Hum. serta dengan Bapak Drs. Ayi Budi Santosa, M.SI. peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian pada satu lembaga saja, yaitu Dewan Pertimbangan Agung, sehingga judul yang diajukan berubah menjadi “*Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1945-2003*”.

Akhirnya peneliti melakukan Seminar Proposal pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Dosen Penguji yaitu Bapak Dr. Andi Suwirta, M.Hum dan Bapak Dr. Wildan Insan Fauzi, M.Pd. salah satu revisi yang diberikan oleh dosen penguji ialah perubahan mengenai rentang tahun penelitian, dikarenakan Dewan Pertimbangan Agung baru berfungsi kembali melalui dekrit presiden pada 5 Juli 1959 setelah sempat vakum pada masa Demokrasi Liberal, sehingga penelitian pun dipersingkat menjadi tahun 1959 sampai 2003 saat Dewan Pertimbangan Agung dibubarkan

3.2.1.2. Bimbingan dan Konsultasi

Dalam Keputusan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2340/UN40.A2/HK.04/2024 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi, peneliti memiliki kesempatan melakukan bimbingan dengan Bapak Dr. Andi Suwirta, M.Hum. sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Wildan Insan Fauzi, M.Pd sebagai dosen pembimbing kedua.

Proses bimbingan dari kedua dosen pembimbing dilakukan dengan cara yang berbeda namun tetap dengan tujuan untuk dapat membantu peneliti menyelesaikan setiap *draft* bab yang diajukan, yaitu Bapak Drs. Andi Suwirta, M.Hum. dengan cara mengumpulkan *draft* untuk kemudian diberikan revisi pada pertemuan selanjutnya, dan Bapak Dr. Wildan Insan Fauzi, M.Pd. dengan cara

melakukan pertemuan langsung untuk melakukan revisi terhadap *draft* bab yang telah diberikan.

Setelah melalui beberapa kali bimbingan dan konsultasi, terdapat beberapa pertimbangan yang peneliti hadapi, salah satunya adalah pertimbangan mengenai rentang waktu yang masih terlalu panjang untuk penelitian. Ditakutkan apabila masih mempertahankan rentang waktu yang dipilih sebelumnya, data yang terhimpun tidak terkolektif dengan sempurna. Apalagi ditambah dengan sulitnya mencari narasumber yang langsung mengalami peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, membuat penelitian perlu disesuaikan agar tidak terlalu menghabiskan waktu terlalu banyak.

Dampak dari masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing, membuat peneliti melakukan penelitian untuk melihat bagaimana sumber tertulis pada Arsip Nasional Republik Indonesia yang dapat dimuat sebagai sumber penelitian, dan ternyata memang perlu ada penyesuaian rentang waktu penelitian yang dibantu dengan adanya sumber tertulis yang termuat di Arsip Nasional Republik Indonesia, membuat peneliti merubah rentang waktu penelitian yang pada awalnya dari tahun 1959 sampai 2003, menjadi pada masa orde baru saja dari tahun 1966 sampai 1998. Hal ini yang menyebabkan peneliti mengganti judul penelitian menjadi “*Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998*”.

3.2.2. Pelaksanaan Penelitian

Pada tahapan pelaksanaan penelitian, akan dijelaskan bagaimana peneliti melakukan langkah-langkah penelitian yang sesuai dengan metode penelitian sejarah. Penelitian yang dilakukan dimulai sejak tanggal 20 Agustus 2024 dan diharapkan dapat selesai pada bulan Desember 2024. Tahapan metode penelitian sejarah dapat dimulai dengan heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik yang peneliti ambil, dilanjut kepada kritik sumber yang bertujuan untuk memilah sumber mana yang cocok dengan penelitian, lalu memasuki tahap interpretasi dan ditutup dengan historiografi. Di bawah ini adalah penerapan metode penelitian yang dilakukan dan dijelaskan sebagai berikut:

3.2.2.1. Pemilihan Topik

Pada tahapan ini peneliti berkewajiban untuk menentukan topik mana yang layak untuk diangkat sebagai sebuah penelitian sejarah yang sesuai dengan latar belakang peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang mengikuti mata kuliah Seminar Proposal Karya Ilmiah (SPKI) dengan Dosen Pengampu Ibu Dr. Murdiah Winarti, M. Hum, dan Bapak Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si. Peneliti memiliki hambatan ketertarikan untuk mencari topik yang tepat untuk diteliti. Sehingga peneliti sempat ingin melanjutkan salah satu penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Sejarah yang lulus pada tahun 2017, yaitu Bapak Al Fajar Bima Sakti, S.Pd. yang membawakan judul “*Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia: Peranan Kepolisian dalam Empat Zaman Tahun 1946-1961*”. Peneliti mencoba mencari topik baru dengan mengangkat judul baru yaitu “*Peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (MALARI) Tahun 1974*”. Namun setelah melakukan presentasi diketahui bahwasanya topik yang mengangkat peristiwa Malari telah dibahas oleh Euis Megiawati, mahasiswa Pendidikan Sejarah yang lulus pada tahun 2016 dengan judul “*Peristiwa Malari dalam Pandangan Para Pelaku Sejarah (Sebuah Kajian Analisa Biografi)*”. Hal ini membuat peneliti segera mengganti topik baru untuk diteliti.

Pada beberapa semester selanjutnya peneliti mengikuti mata kuliah Pendekatan Interdisipliner yang diampu oleh Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si. dan peneliti mendapatkan tugas untuk membuat presentasi penggunaan pendekatan interdisipliner pada judul skripsi masing-masing. Mengingat bahwa peneliti belum menemukan topik, sehingga peneliti melakukan riset terhadap topik baru yang akan diangkat. Pada saat itu peneliti mendatangi Perpustakaan UPI dan menemukan sebuah buku berjudul “*Memori Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2014-2019*”. Peneliti langsung memiliki ketertarikan untuk meriset lebih lanjut bagaimana sejarah dari lembaga ini, yang ditemukan bahwa pada awal kemerdekaan, terdapat lembaga yang memiliki peran serupa dengan Dewan

Pertimbangan Presiden yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membawa topik Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Presiden ke dalam penelitian ini.

Setelah melalui mata kuliah Pendekatan Interdisipliner, peneliti akhirnya memilih untuk berfokus pada pembahasan Dewan Pertimbangan Agung, setelah melihat kondisi dimana tidak adanya transparansi laporan pertimbangan kepada presiden, yang berbanding terbalik dengan Dewan Pertimbangan Presiden, yang dalam pembukuan Memori Lembaga Dewan Pertimbangan Agung Tahun 2014-2019, disebutkan adanya data berapa banyak rekomendasi yang diberikan. Kosongnya transparansi Dewan Pertimbangan Agung terkait pertimbangannya kepada masyarakat membuat peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini ke dalam penelitian.

3.2.2.2. Heuristik

Heuristik atau pengumpulan sumber menurut Carrard dan C.F. Gee (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 67) merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah dan evidensi sejarah. Kedudukan dari data-data sejarah itu sangatlah penting, karena untuk mengungkap suatu peristiwa sejarah tersebut maka seorang sejarawan harus bisa mengeksplorasi sumber-sumber sejarah yang berserakan di berbagai tempat. Sumber sejarah itu merupakan bahan-bahan mentah yang mencakup segala macam evidensi yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lampau baik yang berupa kata-kata tertulis ataupun kata-kata yang diucapkan secara lisan (Sjamsuddin, 2012, hlm.75). sejauh ini peneliti baru melakukan penelitian dengan teknik literatur dengan melakukan pengkajian terhadap sumber tertulis seperti buku, arsip, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji. Untuk melaksanakan penelitian tersebut, peneliti melakukan eksplorasi ke beberapa tempat untuk mendapatkan sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu tempat-tempat sebagai berikut:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia

Untuk mendapatkan sumber yang tervalidasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru, peneliti melakukan riset menuju Arsip Nasional Republik Indonesia. Penelitian dimulai sejak 18 Oktober 2024, dan hasil yang didapatkan menunjukkan adanya Daftar Arsip tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA RI) Tahun 1977-1999. Di dalam katalog itu beberapa sumber primer didapatkan seperti:

- a. Memorandum Akhir Dewan Pertimbangan Agung periode 1968-1973 karya Dewan Pertimbangan Agung
- b. Memorandum Akhir Dewan Pertimbangan Agung periode 1973-1978 karya Dewan Pertimbangan Agung
- c. Memorandum Akhir Dewan Pertimbangan Agung periode 1978-1983 karya Dewan Pertimbangan Agung
- d. Memorandum Akhir Dewan Pertimbangan Agung periode 1983-1988 karya Dewan Pertimbangan Agung
- e. Memorandum Akhir Dewan Pertimbangan Agung periode 1988-1993 karya Dewan Pertimbangan Agung
- f. Memorandum Akhir Dewan Pertimbangan Agung periode 1993-1998 karya Dewan Pertimbangan Agung
- g. Sejarah Dewan Pertimbangan Agung. Buku II: Dewan Nasional periode 1956-1959 karya Dewan Pertimbangan Agung
- h. Sejarah Dewan Pertimbangan Agung. Buku III: Dewan Pertimbangan Agung Sementara periode 1959-1965 karya Dewan Pertimbangan Agung.

Peneliti melakukan penelitian dengan kunjungan sebanyak lima kali dan berhasil mengumpulkan 210 pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Pertimbangan tersebut juga masih perlu riset kepada dokumen lain karena katalog hanya menyediakan memorandum laporan pertanggungjawaban pertimbangan dari tahun 1978 hingga tahun 1999. Sedangkan untuk memorandum laporan pertanggungjawaban dari tahun 1968 hingga 1978 terpisah-pisah dalam memorandum laporan pertanggungjawaban setiap tahun, tidak

seperti memorandum yang lain yang tertulis per periode. Selain itu juga karena laporan pertanggungjawaban Dewan Pertimbangan Agung merupakan arsip rahasia yang tidak boleh didokumentasikan secara sembarangan, pihak Arsip Nasional Republik Indonesia mewajibkan pembayaran untuk dokumentasi terhadap setiap halaman yang dibutuhkan, dengan harga Rp 1.000 per foto. Dari 210 pertimbangan, terkumpul sebanyak 720 halaman yang perlu didokumentasikan seluruhnya, sehingga peneliti menghabiskan biaya sebesar Rp 720.000 untuk bisa mengumpulkan semua dokumentasi arsip Dewan Pertimbangan Agung ini. Sedangkan untuk dokumentasi pelengkap dari buku Sejarah Dewan Pertimbangan Agung peneliti mendokumentasikan sebanyak 47 halaman, sehingga perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp 47.000. sehingga total untuk seluruh dokumentasi mengenai Dewan Pertimbangan Agung di Arsip Nasional Republik Indonesia mencapai Rp 767.000.

2. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia

Pencarian pada perpustakaan ini dilaksanakan untuk melakukan riset terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kunjungan pada perpustakaan ini dimulai dari tanggal 21 November 2022 dan masih mencari buku yang relevansi dengan judul penelitian ini. Beberapa buku yang ditemukan oleh peneliti adalah:

- a. Memori Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2014-2019 karya Tim Penyusun Dewan Pertimbangan Presiden
- b. Konstitusi & Konsitusionalisme Indonesia karya Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.

3. Toko Buku Palasari Bandung

Pencarian sumber berlanjut dengan mencari buku-buku yang sulit ditemukan pada perpustakaan-perpustakaan umum di Bandung, namun ternyata ada di Toko Buku Palasari. Pencarian sumber buku ini dimulai semenjak 14 januari 2024 dan masih terus berlanjut sampai saat ini. Berikut ini sumber relevan yang peneliti temukan yaitu:

- a. DPA dari Zaman ke Zaman karya Arnold Achmad Baramuli dan Abdul Gafur

- b. Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung karya Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.
- c. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara karya Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.
- d. Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara karya Dr. Benediktus Cipto Handoto, S.H., M.Hum.

4. Perpustakaan Dinas Sejarah TNI-AD

Selanjutnya penelitian dilaksanakan untuk melakukan riset terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan tokoh-tokoh militer yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Pencarian sumber disini dimulai sejak 19 September 2024, dan sumber yang didapatkan yaitu:

- a. M. Panggabean: Jenderal dari Tano Batak karya TNI Angkatan Darat
- b. Laksamana Sudomo: Mengarungi Lintas Kehidupan karya Julius Pour
- c. Metodologi Sejarah karya Kuntowijoyo

5. E-heuristik

Peneliti melakukan riset-riset lainnya terhadap skripsi, jurnal, dan artikel yang dapat membantu penelitian yang sedang dikaji. Dengan adanya sumber ini dapat membantu untuk mendapatkan informasi yang menambah kajian yang dibutuhkan dalam riset. Berikut data-data yang berhasil peneliti dapatkan:

- a. Buku dengan judul Pengantar Ilmu Hukum karya Van Apeldorn
- b. Buku dengan judul Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2017 karya Ahmad Fachrudin.
- c. Buku dengan judul *Checks and Balance* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia karya Tim Penulis Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d. Jurnal dengan judul Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden karya Nitaria Angkasa & Tria Noviantika.
- e. Jurnal dengan judul Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karya Sesi Deska Fitri & Bustanuddin.

- f. Jurnal dengan judul Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia karya Danang Risdianto.
- g. Disertasi dengan judul Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 karya Adnan Buyung Nasution
- h. Skripsi dengan judul Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia karya Yusri Wahyuni
- i. Referensi gambar-gambar yang berkaitan dengan Dewan Pertimbangan Agung

3.2.2.3. Kritik Sumber

Beberapa sumber yang sudah terkumpul kemudian masuk ke dalam tahap kritik sumber, sumber-sumber tersebut kemudian diverifikasi untuk diketahui keaslian dan kredibilitasnya. Kritik sumber pada dasarnya adalah menguji atau menyaring berbagai macam sumber yang telah ditemukan dilapangan dengan cara menganalisis secara kritis dan mendalam. Dalam proses kritik tersebut terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal atau kritik material dan kritik internal atau kritik substansial. Tujuan dari kritik sumber adalah mencari kebenaran dan membedakan antara sumber yang benar (asli) dengan sumber yang tidak benar (palsu) (Sjamsuddin, 2012, hlm. 103). Setelah melakukan pengumpulan sumber, maka peneliti memasuki pada tahap selanjutnya:

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Sebelum sumber-sumber itu digunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, maka diperlukan pemeriksaan yang ketat agar terhindar dari pemalsuan sumber sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm. 84). Dalam hal ini sumber primer merupakan sumber yang perlu melewati tahapan kritik eksternal untuk dapat memvalidasi asal-muasal sumber yang diberikan. Dikarenakan peneliti belum melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai sumber primer, maka untuk sementara peneliti berfokus untuk melakukan kritik eksternal terhadap sumber primer yang lainnya yaitu arsip-arsip dokumen yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hal ini

dikarenakan sumber yang berasal dari arsip merupakan dokumen tertulis berupa surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja dan lain sebagainya yang isinya mencatat tentang berbagai macam kejadian penting di masa lampau (Kuntowijoyo, 2005, hlm. 96).

Menurut Sulasman (2014, hlm. 103) menyatakan bahwa kritik eksternal harus menegaskan fakta dari kesaksian bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan pada waktu ini (*authenticity*) dan kesaksian yang telah diberikan telah bertahan tanpa ada perubahan (*uncorrupted*), tanpa ada tambahan atau penghilangan substansial. Untuk menentukan sebuah sumber sejarah otentik, informasi yang harus didapat yaitu:

1. Nama penulis

Sumber primer yang didapatkan berasal dari lembaga tinggi negara bernama Dewan Pertimbangan Agung yang merupakan salah satu bagian institusi pemerintah yang berdiri dengan landasan Undang-Undang 1945.

2. Tanggal dari penulisan

Setiap menyelesaikan periode kepemimpinan, Dewan Pertimbangan Agung melakukan penulisan Laporan Pertanggungjawaban yang bertugas untuk dapat mendokumentasikan apa saja yang sudah dikerjakan selama satu periode. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut dijelaskan setiap kegiatan beserta dengan tanggal keputusan yang dibuat.

3. Tempat dari penulisan

Penulisan setiap keputusan dituliskan dari gedung kantor Dewan Pertimbangan Agung yang bertempat di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat.

4. Orisinalitas dari penulisan

Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Agung disahkan dan diresmikan dengan tanda tangan dari Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan cap resmi lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang menguatkan setiap dokumentasi yang keluar dari Dewan Pertimbangan Agung otentik.

Arsip yang peneliti temukan dalam Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan laporan-laporan terhadap kinerja yang diberikan oleh Dewan

Pertimbangan Agung selama menjalankan tugasnya sebagai badan penasihat presiden. Selain itu juga terdapat laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh setiap Ketua Dewan Pertimbangan Agung dalam melaporkan kinerja yang diberikan selama menjabat. Arsip yang tercatat merupakan dokumen asli karena secara fisik dapat terlihat bahwa arsip sudah terlihat lapuk, rapuh, dan menguning. Penulisan yang dituangkan dalam arsip tersebut masih menggunakan mesin tik yang menunjukkan bahwa penulisan arsip tersebut dilakukan secara manual. Selain itu juga terdapat tanda tangan menggunakan tinta asli yang dibubuhkan oleh setiap Ketua Dewan Pertimbangan Agung dalam setiap laporan pertanggungjawabannya untuk menunjukkan otentitas yang dituangkan dalam arsip tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsip yang digunakan dalam sumber primer penelitian ini sah dan asli.

b. Kritik Internal

Selain melakukan kritik eksternal terdapat sumber-sumber yang telah dikumpulkan, peneliti melanjutkan langkah kritik selanjutnya pada kritik internal, yang kali ini berfokus pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Mendapati bahwa sumber primer yaitu arsip telah melalui kritik eksternal, maka untuk kritik internal peneliti memilih untuk melakukan perbandingan antara tiga sumber yang peneliti pilih untuk membandingkan kesesuaian data dari masing-masing sumber.

Tujuan dari kritik internal ini salah satunya untuk menilai bagaimana peranan Dewan Pertimbangan Agung dalam memberikan nasihat atau saran kepada para presiden, yang dimana menurut Arnold Achmad Baramuli dalam buku berjudul *DPA dari Zaman ke Zaman* menyatakan bahwa setiap periode pemerintahan kepresidenan sampai pada masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung menjalankan tugasnya sebagai badan penasihat presiden. Hal ini sejalan dengan buah pemikiran Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, yang isinya membahas peranan yang dijalankan oleh Dewan Pertimbangan Agung sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang telah dibuat. Namun kedua pendapat ini bertentangan dengan apa yang

dibahas oleh Yusri Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul *Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, yang dimana Wahyuni mengatakan bahwa tupoksi yang diberikan kepada Dewan Pertimbangan Agung tidak dijalankan dengan baik sehingga memicu pembubaran pada tahun 2003.

Dalam kondisi perbedaan pandangan ini, peneliti memilih untuk lebih mempercayai sumber yang diberikan oleh Arnold Achmad Baramuli dan Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. karena persamaan pandangan terhadap peranan Dewan Pertimbangan Agung, serta pernyataan yang diberikan dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan. Selain itu juga kedua buku ini mengambil langsung bukti-bukti kearsipan sebagai bentuk kemurnian sumber yang dibawakan.

3.2.2.4. Interpretasi

Setelah sumber-sumber tersebut di kritik secara eksternal maupun internal, maka tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan. Dari sumber-sumber tersebut akan diperoleh berbagai macam fakta yang harus diolah, dirangkai dan ditafsirkan agar menjadi satu tulisan yang utuh. Ketika seorang sejarawan menulis, maka sadar atau tidak sadar mereka telah berpegang pada salah satu kombinasi beberapa filsafat sejarah tertentu yang menjadi dasar penafsirannya. Pada tahap ini peneliti perlu melakukan pengumpulan seluruh sumber yang sudah melalui proses kritik sumber untuk dapat menentukan hasil penafsiran yang baru tentang penelitian ini.

Oleh karena itu peneliti memilih untuk menggunakan interpretasi pluralistik. Menurut filsuf abad ke-19 yang dikemukakan oleh Abdurahman (2007, hlm. 76) berpandangan bahwa sejarah akan mengikuti perkembangan-perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menunjukkan pola peradaban yang bersifat multikompleks. Para ahli sejarah memberikan kebebasan dalam menggunakan metode interpretasi yang logis untuk mencapai tujuannya, karena kemajuan studi sejarah beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. (Abdurahman, 2007, hlm. 76). Menurut penafsiran ini, tidak ada satu kategori “sebab-sebab” tunggal yang cukup untuk menjelaskan semua fase dan

periode perkembangan sejarah. hal ini sesuai dengan topik penelitian yang dimana keberlangsungan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara untuk Presiden Soeharto, beriringan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum yang berlaku seiring berjalannya waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua konsep yang berfungsi membantu penelitian ini, yaitu konsep sistem ketatanegaraan dan sistem badan penasihat negara.

Keterkaitan konsep sistem ketatanegaraan dengan penelitian ini adalah Dewan Pertimbangan Agung merupakan bagian dari sebuah konstitusi yang dibentuk oleh negara Indonesia pada awal kemerdekaan 1945. Sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pemerintahan, jelas kedudukan dari Dewan Pertimbangan Agung sangat berkaitan dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwasanya terjadi beberapa kali pergantian bentuk sistem ketatanegaraan di Indonesia, posisi dari Dewan Pertimbangan Agung juga menjadi perlu dipertimbangkan kedudukannya. Hal ini didasari dengan kondisi sempat adanya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung pada masa Republik Indonesia Serikat, munculnya kembali Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada periode Demokrasi Terpimpin, dan kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru menyebabkan sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki keterhubungan dengan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung di sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selanjutnya hubungan antara badan penasihat negara dengan penelitian ini adalah bentuk dari Dewan Pertimbangan Agung itu sendiri merupakan sebuah badan penasihat presiden selaku pemangku jabatan tertinggi negara. Konsep sebuah badan penasihat ini sudah dimiliki oleh beberapa negara lain yang menerapkan adanya lembaga penasihat di dalam struktur pemerintahannya. Dewan Pertimbangan Agung sendiri merupakan sebuah adaptasi dari lembaga penasihat yang dimiliki oleh kerajaan Belanda pada masa penjajahan yaitu *Raad Van State* yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada raja atau ratu yang berkuasa. Konsep badan penasihat ini juga menjadi faktor penguat mengapa Dewan Pertimbangan Agung dapat bertahan di Indonesia khususnya

selama masa Orde Baru. Oleh sebab itu penelitian mengenai Dewan Pertimbangan Agung sangat berkaitan erat dengan konsep badan penasihat negara yang dapat menopang informasi tentang esensi mengenai tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung di masa Orde Baru.

3.2.2.5. Historiografi

Usai melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan di lapangan, maka tahapan terakhir yang harus ditempuh adalah penulisan ulang sejarah atau dikenal dengan historiografi. Dalam menuliskan suatu peristiwa sejarah, maka seorang penulis harus bisa mengeluarkan segala kemampuannya. Kemampuan itu tidak hanya berupa keterampilan menulis seperti teknik penggunaan berbagai macam kutipan saja tetapi ia harus bisa menuangkan pikiran-pikiran kritisnya, imajinasinya untuk menghasilkan suatu sintesis dalam suatu penulisan yang utuh yaitu historiografi (Sjamsuddin, 2012 hlm.121).

Sebuah hasil akhir dari penelitian sejarah memiliki berbagai macam cabang penalaran yang disesuaikan dengan ilmu bantu sosialnya. Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan ilmu politik sebagai ilmu bantu dalam penelitian ini, atau dapat disimpulkan sebagai konsep sejarah politik. Menurut Kuntowijoyo (2005, hlm. 173) sejarah politik dapat didefinisikan sebagai sejarah dari kegiatan yang berhubungan dengan negara atau pemerintahan. Selain itu juga terdapat ungkapan dari Sir John Robert Seeley (dalam Kuntowijoyo, 2005, hlm. 174) yaitu *“history is past politics, and politics is present history”* yang menunjukkan adanya bentuk keterkaitan antara sejarah dengan politik. Alasan peneliti menggunakan sejarah politik dikarenakan adanya keterkaitan Dewan Pertimbangan Agung dengan pengaruh situasi politik di Indonesia pada masa Orde Baru.

Sejarah politik bisa menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan Sejarah Konstitusional. Dari sebuah konstitusi suatu bangsa, dapat diketahui bagaimana filsafat hidup, dasar pemikiran saat membangun bangsa, dan bagaimana struktur pemerintahan yang dibangun. (Kuntowijoyo, 2005, hlm. 177).

Saat membangun sebuah konstitusi juga akan terlihat bagaimana kepentingan politik yang muncul, konsensus yang dibuat, dan konsesi yang diberikan kepada masing-masing kepentingan tersebut. (Kuntowijoyo, 2005, hlm. 177). Yang membuat pendekatan ini cocok dengan penelitian yang akan dilakukan karena Dewan Pertimbangan Agung merupakan sebuah lembaga yang tergabung di dalam sebuah konstitusi negara Indonesia. Hal ini yang membuat setiap keputusan atau pertimbangan yang diambil dari Dewan Pertimbangan Agung akan memberikan dampak kepada pemerintahan. Selain itu juga Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga tinggi negara yang setiap catatan historisnya tersimpan di arsip, yang menyebabkan pendekatan konstitusional akan cocok dengan penelitian ini.

Setelah melalui proses penelitian dengan menggunakan metode penelitian sejarah, peneliti menyusun hasil penelitian dengan bentuk sebuah skripsi, yang penulisannya disesuaikan dengan standar karya tulis ilmiah dari lembaga peneliti yaitu Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021 dengan sistem penulisan *American Psychological association (APA) style 7* yang menjadi landasan dalam sebuah penulisan kutipan dalam skripsi. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yaitu bab I Pendahuluan, bab II Kajian Pustaka, bab III Metode Penelitian, bab IV Temuan dan Pembahasan, dan bab V Simpulan.